Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 1, Januari 2018: 51-57

Jurnal Ekononomi & Keuangan Islam

Available at http://journal.uii.ac.id/index.php/jeki

Analisis regional keuangan inklusi perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

Prastowo
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
e-mail: prastowo@uii.ac.id

Keywords:

financial inclusion, Income inequality

DOI:
10.20885/JEKI.vol4.iss1.art6

Abstract

Indonesia as a Muslim dominated country has problem in high level of income inequality. In this regards, promoting financial inclusion in Islamic banking is argued to overcome problem of inequality in income distribution, especially for poor Muslim people. The spirit of financial inclusion and Islamic banking are expected to serve the goal of Islamic teaching on social justice, inlusion and distributiong resources between the rich and the poor. Nevertheless, the number of studies in the field of financial inclusion in Islamic banking still limited. Therefore, this research is aimed at observing the impact of financial inclusion in Islamic bank on income inequality in 33 provinces in Indonesia. This research applies financial inclusion index (FII) and Panel Least Squares which cover 2014 to 2016. Based on the result, it can be shown that financial inclusion in Islamic banking have significantly negative relationship with Gini index. Financial inclusion in Islamic banking contributes to reduce income inequality in Indonesia.

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang didominasi muslim memiliki masalah pada tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dalam hal ini, mempromosikan inklusi keuangan dalam perbankan Islam dikemukakan untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam distrbusi pendapatan, terutama bagi orang-orang Muslim yang miskin. Semangat inklusi keuangan dan perbankan syariah diharapkan untuk melayani tujuan pengajaran Islam tentang keadilan sosial, inklusi dan distribusi sumber daya antara yang kaya dan yang miskin. Namun, jumlah studi dibidang keuangan inklusi dalam perbankan Islam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengamati dampak inklusi keuangan di bank syariah pada ketimpanagn pendapatan di 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan financial inclusion index (FII) dan panel Least Square yang mencakup tahun 2014 hingga 2016. Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditunjukkan bahwa inklusi keuangan perbankan syariah memiliki hubungan negatif signifikan dengan indeks Gini. Inklusi Keuangan pada perbankan syariah berkontribusi menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Pendahuluan

Hal dasar yang membedakan antara kemiskinan dengan ketimpangan distribusi pendapatan terletak pada cakupan objek. Fokus pembahasan kemiskinan menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah ambang garis kemiskinan yang ditetapkan secara absolut (contoh: minimal konsumsi kalori) dan secara relatif (contoh: gaya hidup di lingkungan masyarakat). Namun, pada dasarnya seseorang dikatakan sebagai orang miskin apabila penghasilan yang didapat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan dasar, dan rumah yang layak (Pramanik, 1997). Menurut Organization of Economic Cooperative and Development (OECD) dan Todaro dan Smith (2015), ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai perbedaan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan antar individu dalam masyarakat. Cakupan ketimpangan pendapatan lebih luas karena dapat menggambarkan kondisi masyarakat pendapatan golongan kaya, sedang dan miskin (Haughton & Khandker, 2009).

Islam dalam hal ini memiliki perhatian khusus dalam permasalahan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan memiliki dampak dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Berg & Ostry, 2011; Berg, Ostry, & Zettelmeyer, 2012; Ostry, Berg, & Tsangarides, 2014, (Dabla-norris and Kochhar, 2015). Oleh karena itu, setiap Muslim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membantu orang lain, termasuk kepada non-Muslim.

Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia menghadapi masalah ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks Gini Indonesia mencapai 0.41 pada tahun 2015.Bahkan, Mohieldin et al., (2012) menyatakan bahwa 73

persen rumah tangga miskin merupakan Muslim dan tidak memiliki rekening bank. Terkait dengan hal ini, banyak penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu penyebab fenomena ketimpangan pendapatan terjadi adalah keterbatasan akses terhadap sektor keuangan (Akimov et al., 2006; Kenourgios & Samitas, 2007; Levine, 2003; Park & Shin, 2015).

Bank Dunia (2008 dalam Mohieldin, et.al. (2012)) membagi dua faktor *financial exclusion*, yaitu *voluntary factor* dan *involuntary factor*. *Voluntary factor* terjadi ketika *non-user* (bukan pengguna) secara sukarela memang tidak menggunakan jasa keuangan yang terjadi karena alasan agama atau karena mereka tidak cukup memiliki pengetahuan terkait pentingnya jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan *involuntary factor* terjadi karena empat alasan. Pertama, kelompok yang dianggap tidak dapat diberikan kredit karena berpenghasilan rendah atau memiliki risiko tinggi gagal bayar. Kedua, ada diskriminasi terhadap kelompok karena latar belakang sosial, agama atau etnis yang kemudian menyebabkan mereka tidak dapat mengakses layanan keuangan. Ketiga, ada kerja kontrak atau informasi yang memiliki biaya tinggi, misalnya pinjaman membutuhkan lebih dari 1 bulan untuk diproses padahal seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Alasan keempat adalah tingginya harga jasa keuangan untuk kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

Salah satu tujuan Bank Syariah didirikan adalah menggantikan suku bunga dan menerapkan skema pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing,* PLS) di seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, penerapan PLS di perbankan syariah dianggap lebih adil sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan distribusi kekayaan di antara inividu masyarakat (Ismail 2010; Ismail et.al. 2014). Merujuk pada tujuan utama bank syariah tersebut, maka tidak dapat dipungkiri jika semangat inklusi keuangan dan perbankan syariah diharapkan mampu untuk melayani tujuan pengajaran Islam terkait keadilan sosial, penyisipan dan distribusi sumber daya antara yang kaya dan yang miskin (Iqbal & Mirakhor, 2013). Dengan kata lain, tujuan pendirian Bank syariah dapat dikatakan tidak hanya mengejar keuntungan saja, melainkan juga mengemban misi sosial.

Dalam konteks Indonesia, Bank syariah didirikan pertama kali pada tahun 1992 dan belum mendapatkan respon yang positif dalam industri perbankan. Pemerintah pada tahun 1998 mengesahkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara jelas mengakui terdapat dua sistem perbankan di Indonesia. Sejak saat itu, industri perbankan memberikan respon yang cukup baik dengan berdirinya beberapa bank syariah ditingkat daerah dan unit usaha syariah. Namun, kurang dari 2 tahun setelah UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah disahkan, terdapat 5 bank umum syariah (BUS) baru didirikan. Secara umum, perkembangan bank syariah di Indonesia selama lebih dari dua dekade dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Namun demikian, terdapat pertanyaan mendasar yang perlu digaris bawahi: *sampai sejauh manakah inklusi keuangan bank syariah di Indonesia telah berkembang di masyarakat?*

Penelitian terdahulu terkait pengukuran inklusi keuangan di Bank syariah masih sangat terbatas, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan inklusi keuangan di perbankan syariah di Indonesia pun juga masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisi pengaruh regional keuangan inklusif pada perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil estimasi didapat dengan melakukan regresi hasil indeks keuangan inklusi syariah dua dimensi dengan indikator ketimpangan pendapatan dan variabel ekonomi lain. Dengan demikian hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan efektivitas strategi keuangan inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, terutama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan data sekunder, yaitu data *cross section* provinsi dari tahun 2014-2016. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 Provinsi di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, BPS dan literatur-literatur lain yang masih berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang digunankan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. data jumlah kantor layanan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)per provinsi;
2. data jumlah Dana Pihak Ketiga BUS, UUS, dan BPRS per provinsi;
3. data jumlah pembiyaan BUS, UUS dan BPRS per provinsi; dan
4. data Produk Doestik Regional Bruto per provinsi.
5. data Produk Doestik Regional Brutoper kapita per provinsi
6. data Gini Rasio per provinsi
7. data jumlah penduduk miskin per provinsi
8. data harapan lama sekolah per provinsi

Pengukuran indeks keuangan inklusi yang dipergunakan dalam penelitian ini merujuk dari penelitian Sarma (2008,2012) dan disesuaikan dengan kondisi di tingkat provinsi. Pendekatan perhitungan indeks dalam

penelitianan ini mirip dengan UNDP seperti perhitungan Human Development Index (HDI). Perhitungan dari IKI dimulai dengan menghitung indeks dari berbagai aspek keuangan inklusi.

$$d_i = \frac{A_i - m_i}{M_i - m_i} \quad (1)$$

Keterangan
A_i = Nilai Aktual dari dimensi i
mi = Nilai Minimum dari dimensi i
Mi = Nilai Maksimum dari dimensi i

Indeks Keuangan Inklusi (IKI) sebagai berikut

$$IKI_i = 1 - \frac{\sqrt{(1-d_1)^2 + (1-d_2)^2 + \cdots (1-d_n)^2}}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Indeks keuangan inklusi menurut Sarma (2008, 2012) terdiri 3 demensi dari sistem keuangan: penetrasi perbankan (PP), ketersediaan pelayanan perbankan (KPP) dan penggunaan jasa perbankan (PJP). Namun, penelitian ini menggunakan 2 dimensi yaitu, (1) Dimensi Ketersediaan Pelayanan Perbankan, jumlah kantor cabang Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (per 100.000 penduduk) untuk mengukur dimensi ketersediaan Pelayanan Perbankan untuk provinsi di Indonesia, (2) Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan, volume dana pihak ketiga dan pembiayaan sebagai proporsi PDRB provinsi digunakan untuk mengukur dimensi penggunaan untuk provinsi di Indonesia.

Nilai indeks keuangan inklusi berada antara 0 dan 1. Nilai IKI= 1 menunjukkan provinsi itu memiliki kondisi keuangan inklusi terbaik di antara provinsi yang lain. Sebaliknya, nilai IKI= 0 menunjukkan provinsi tesebut memiliki kondisi keuangan inklusi paling buruk. Tingkat inklusi keuangan semakin baik, jika nilai indeks inklusi keuangan mendekati 1. Nilai indeks keuangan inklusi dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Tingkat inklusi keuangan tinggi jika nilai indeks keuangan inklusi $0,6 < IKI \leq 1$, tingkat keuangan inklusi sedang jika nilai indeks keuangan inklusi $0,3 \leq d \leq 0,6$, dan tingkat keuangan inklusi rendah jika nilai indeks $\leq 0,3$.

Model ekonometrik dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang mencakup tahun 2014 hingga 2016. Terdapat 4 variabel yang akan digunakan dalam regresi panel data, sebagai berikut:

$$\log GINI_{i,t} = \alpha + \beta_1 \log IKI_{i,t} + \beta_2 \log PDRB_{i,t} + \beta_3 \log POV_{i,t} + \beta_4 \log HLS_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Simbol	Ukuran	Sumber
Ketimpangan Pendapatan	GINI	Gini index data	BPS
Financial Development			
Keuangan Inklusi	IKI	Indeks Keuangan Inklusi Perbankan Syariah	Perhitungan penulis
Control Variables			
Pertumbuhan ekonomi	PDRB	PDRB per kapita Atas dasar Harga Konstan 2010	BPS
Kemiskinan	POV	Jumlah penduduk miskin	BPS
Pendidikan	HLS	Harapan lama sekolah	BPS

Analisis dan Pembahasan

Hasil perhitungan IKI di 33 provinsi di Indonesia dibentuk dari 2 dimensi yaitu dimensi Ketersediaan Pelayanan Perbankan dan dimensi Kegunaan Jasa Perbankan. Penelitian ini membagi nilai indeks keuangan inklusi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi ($0,6 < FII \leq 1$), sedang ($0,3 < FII \leq 6$), dan rendah ($FII \leq 3$). Berdasarkan nilai indeks keuangan inklusi, sebesar 84,8 persen atau sebanyak 28 provinsi dikategorikan memiliki indeks keungan inklusi rendah. Provinsi yang dikategorikan memiliki indeks keuangan inklusi sedang, sebesar 15,2 persen atau sebanyak 5 provinsi, yaitu Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 0,41079, Jawa Tengah dengan rata-rata sebesar 0,33741, Jawa Timur dengan rata-rata sebesar 0,3479, D.I Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 0.31334, dan Bangka Belitung dengan rata-rata sebesar 0.3076.

Tabel 2. Regional Indeks Keuangan Inklusi Perbankan Syariah

No.	Provinsi	2014	2015	2016	Rata-rata
1.	Jawa Barat	0.40719	0.41121	0.41397	0.41079
2.	Banten	0.23381	0.23838	0.23552	0.23590
3.	DKI Jakarta	0.29354	0.27839	0.29035	0.28743
4.	D.I Yogyakarta	0.29420	0.30865	0.33716	0.31334
5.	Jawa Tengah	0.33592	0.33901	0.33729	0.33741
6.	Jawa Timur	0.35134	0.35271	0.33967	0.34790
7.	Bengkulu	0.18448	0.17262	0.18006	0.17905
8.	Jambi	0.02986	0.03432	0.02892	0.03103
9.	Aceh	0.17033	0.18103	0.29838	0.21658
10.	Sumatera Utara	0.19018	0.19247	0.17002	0.18422
11.	Sumatera Barat	0.16569	0.16047	0.14565	0.15727
12.	Riau	0.08926	0.07969	0.07032	0.07976
13.	Sumatera Selatan	0.09731	0.09201	0.08050	0.08994
14.	Bangka Belitung	0.30690	0.30676	0.30915	0.30760
15.	Kepulauan Riau	0.06102	0.06433	0.07058	0.06531
16.	Lampung	0.14184	0.14407	0.17726	0.15439
17.	Kalimantan Selatan	0.08281	0.08275	0.05885	0.07480
18.	Kalimantan Barat	0.04463	0.04898	0.04073	0.04478
19.	Kalimantan Timur	0.09012	0.08934	0.07270	0.08405
20.	Kalimantan Tengah	0.03236	0.03488	0.03447	0.03390
21.	Sulawesi Tengah	0.02009	0.01986	0.02316	0.02104
22.	Sulawesi Selatan	0.14651	0.14963	0.12059	0.13891
23.	Sulawesi Utara	0.00994	0.00987	0.01151	0.01044
24.	Gorontalo	0.00070	0.00059	0.00048	0.00059
25.	Sulawesi Barat	0.00029	0.00512	0.00135	0.00225
26.	Sulawesi Tenggara	0.02491	0.02464	0.02872	0.02609
27.	Nusa Tenggara Barat	0.16611	0.16463	0.15713	0.16262
28.	Bali	0.04106	0.04119	0.03628	0.03951
29.	Nusa Tenggara Timur	0.00494	0.00489	0.00573	0.00519
30.	Maluku	0.00032	0.00033	0.00035	0.00033
31.	Papua	0.00569	0.00541	0.00607	0.00572
32.	Maluku Utara	0.04296	0.05755	0.07821	0.05957
33.	Papua Barat	0.00007	0.00008	0.00011	0.00009

Sumber : perhitungan penulis

Provinsi yang memiliki indeks keuangan inklusi sedang adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bangka Belitung untuk tahun 2014. Sementara itu, tahun 2015 dan 2016 bertambah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan nilai dimensi dari Indeks Keuangan Inklusi, sebaran nilai dimensi keuangan inklusi Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dari provinsi lainnya.

Tabel 3. Deskriptif Statistik

	GINI	IKI	PDRB	POV	HLS
Rata-rata	0.368455	0.128621	36993.47	847.654	12.649
Maksimum	0.459000	0.413970	149779.4	4775.97	15.230
Minimum	0.275000	7.00E-05	10742.32	66.620	9.940
Std. Dev.	0.040849	0.118965	29096.72	1217.332	0.809
Jumlah observasi	99	99	99	99	99

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Diolah.

Tabel 3 menunjukkan rata-rata Gini pada tahun yang diamati adalah 0.368 dengan standar deviasi sebesar 0.040. Variabel Ginimemiliki nilai minimum sebesar 0.275 dan nilai maksimum sebesar 0.459. Sementara itu, rata-rata IKI provinsi pada tahun yang diamati adalah 0.128 dengan standar deviasi sebesar 0.118. Variabel IKI memiliki nilai minimum sebesar 0.00007dan nilai maksimum sebesar0.413.

Rata-rata PDRB per kapita (PDRB) pada tahun yang diamati adalah 36993.47juta rupiahdengan standar deviasi sebesar 29096.72 juta rupiah. PDRB per kapita memiliki nilai minimum sebesar 10742.32 juta rupiah dan

nilai maksimum sebesar 149779.4 juta rupiah. Rata-rata jumlah penduduk miskin (POV) pada tahun yang diamati sebesar 847.64 ribu penduduk dengan standar deviasi sebesar 1217.33 ribu penduduk. Nilai maksimum jumlah penduduk miskin sebesar 4775.97 ribu penduduk dan nilai minimum sebesar 66.62 ribu penduduk. Rata-rata Harapan Lama Sekolah provinsi di Indonesia pada tahun yang diamati adalah 12.649 tahun dengan standar deviasi sebesar0.809 tahun. Variabel HLS memiliki nilai minimum sebesar 9.940 tahun dan nilai maksimum sebesar 15.230 tahun .

Tabel 4. Hasil Regresi PanelLeast Squares Gini(log)

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)
C	-1.027***	-1.340***	-1.793***	-1.858***
	[-51.72]	[-6.26]	[-8.02]	[-3.57]
IKI (log)	-0.007	-0.008	-0.016***	-0.016***
	[-1.41]	[-1.56]	[-3.00]	[-2.95]
PDRB (log)		0.030	0.045**	0.046**
		[1.45]	[2.37]	[2.33]
POV (log)			0.044***	0.044***
			[4.27]	[4.24]
HLS (log)				0.022
				[0.13]
R-squared	0.020	0.041	0.19	0.196
observasi	99	99	99	99
provinsi	33	33	33	33
tahun	2014-2016	2014-2016	2014-2016	2014-2016

Keterangan: nilai dalam kurung buka adalah t-stat.
***,**,dan * signifikan pada p<0.01, p<0.05 dan p<0.10
Sumber: Estimasi penulis

Tabel 4. menunjukkan hasil regresi panel 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2016. Berdasarkan hasil regresi model 1 dan 2 menunjukkan variabel keuangan inklusi pada perbankan Islam tidak signifikan terhadap gini. Sebaliknya pada model 3 dan 4 keuangan inklusi pada perbankan Islam memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap gini atau dapat di interpretasikan bahwa ketika keuangan inklusi pada perbankan mengalami kenaikan, maka ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan. Temuan tersebut selaras dengan Herrero dan Turegano (2015) yang menyatakan bahwa keuangan inklusi berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, temuan Park dan Mercado (2015); Neaime dan Gaysset (2018) menunjukan bahwa keuangan inklusi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Variabel PDRB yang merefleksikan pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kuznet (1955) bahwa secara umum pada fase awal pembangunan di Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan. Aghion dan Bolton (1997) juga mendukung argumen bahwa tambahan kekayaan yang didapat oleh kelompok berpenghasilan tinggi merupakan pertanda baik untuk kelompok berpenghasilan rendah. Namun demikian, hasil studi (Berg & Ostry, 2011; Berg, Ostry, & Zettelmeyer, 2012; Ostry, Berg, & Tsangarides, 2014) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang peningkatan ketimpangan pendapatan akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan positif antara PDRB dengan ketimpangan pendapatan perlu segera diwaspadai terutama dalam jangka panjang agar dapat mencegah terjadinya ketidakstabilan ekonomi.

Pada model 3 dan 4 menunjukkan bahwa hubungan positif dan signifikan jumlah penduduk miskinterhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan jumlah penduduk miskin berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sementara itu, tingkat pendidikan (HLS) secara statistik tidak signifikan. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian penduduk Indonesia menyelesaikan pendidikan formalnya pada tingkat sekolah menengah pertama. Hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regional keuangan inklusif pada perbankan syariah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Studi kasus dilakukan lintas 33 provinsi dari tahun 2014 hingga 2016 dengan menggunakan Panel least squares. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keuangan inklusi pada perbankan syariah memiliki pengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. keuangan inklusi berkontribusi

untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hasil ini menegaskan kembali bahwa diperlukannya dukungan penuh dari pemerintah untuk semakin mengembankan perbankan

Implikasi dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong keuangan inklusif semakin berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan alternatif di sektor perbankan untuk membuka *branchless banking* di desa-desa. *Branchless banking* merupkan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses jasa keuangan tanpa bergantung pada keberadaan fisik sebuah bank di sebuah daerah. Akhirnya, hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk mereformasi sektor keuangan dengan menunjukkan bagaimana memperluas penggunaan layanan perbankan dapat berdampak langsung pada distribusi pendapatan.

Daftar Pustaka

Aghion, P. & Bolto, P. (1997). A Theory of Trickle-Down Growth and Development. *The Review of Economic Studies*, 64 (2), 151-172

Akimov, A., Wijeweera, A., & Dollery, B. (2006). Finance-Growth Nexus: Evidence from Transition Economies. *Economics Working Paper Series*, (2006-5).

Berg, A., & Ostry, J. (2011). Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? *International Monetary Fund Staff Discussion Note*, 1–21. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Berg, A., Ostry, J. D., & Zettelmeyer, J. (2012). What makes growth sustained? *Journal of Development Economics*, 98(2), 149–166.

Dabla-norris, E., & Kochhar, K. (2015). *Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective* (June 2015 No. SDN/15/13).

García-Herrero, A., & Turégano, D. M. (2015). Financial inclusion, rather than size, is the key to tackling income inequality. *BBVA Research Working Paper*, 15(05).

Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. The World Bank.

Hannig, Alfred & Jansen, Stefan, Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues (December 21, *2010*). *ADBI Working Paper* No.259.

Ismail, A. G. (2010). Islamic banks and wealth creation. *International Shari'ah Reseach Academy for Islamic Finance (ISRA) Journal*, *9*, 1–16.

Ismail, A. G., Akbar, S., & Ngalim, S. M. (2014). Measuring the Value of Islamic Banks. *Irti Working Paper Series*, (1435–13), 28.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic Development and Islamic Finance*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8

Kenourgios, D., & Samitas, A. (2007). Financial development and economic growth in a transition economy: Evidence for Poland. *Journal of Financial Decision Making*, 3(1), 35-48.

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American economic review*, 45(1), 1-28.

Levine, R. (2003). More on finance and growth: more finance, more growth?. *Review-Federal Reserve Bank Of Saint Louis*, 85(4), 31-46.

Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2011). *The role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) countries*. The World Bank.

Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality. *Finance Research Letters*, 24, 230-237.

Ostry, M. J. D., Berg, M. A., & Tsangarides, M. C. G. (2014). *Redistribution, inequality, and growth*. International Monetary Fund.

Park, C. Y., & Mercado, R. (2015). Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia. *ADBEconomics Working Paper Series,* 426, (2015)

Park, D., & Shin, K. (2017). Economic growth, financial development, and income inequality. *Emerging Markets Finance and Trade*, *53*(12), 2794-2825.

Pramanik, Ataul Huq. (1993). *Development and Distribution in Islam*. Kuala Lumpur: Pelanduk Press.

Sarma, M. (2008). Index of financial inclusion. *ICRIER Working Papper,* 215.

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion–A measure of financial sector inclusiveness. *Money, Trade, Finance, and Development Competence Centerin cooperation with DAAD Partnership and Hochschule für Technik und Wirschaft Berlin University of Applied Sciences. Working Paper*, (07).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson. https://doi.org/10.1017/CBO9781139028295

Yorulmaz, Recep. "Construction of a regional financial inclusion index in Turkey." *Journal of BRSA Banking and Financial Markets* 7, no. 1 (2013): 79-101.